

Judul : Mahasiswa butuh KIP, Komisi VII desak BPS percepat revisi desil
Tanggal : Kamis, 17 September 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Mahasiswa Butuh KIP Komisi VIII Desak BPS Percepat Revisi Desil



Atalia Praratya

ANGGOTA Komisi VIII DPR Atalia Praratya menyoroti sistem klasifikasi desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang menjadi acuan utama dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah. Persoalan desil bukan lagi sekadar administratif, tapi sudah menyentuh hak dasar rakyat atas pendidikan dan perlindungan sosial.

Seharusnya desil ini menjadi alat bantu Pemerintah menyasar yang paling membutuhkan. Bukan malah menjadi tembok yang menghalangi anak-anak miskin untuk kuliah. "Kalau alat ukurnya saja bermasalah, bagaimana mungkin keadilan sosial yang dijanjikan negara bisa sampai ke rakyat," tegas Atalia di Jakarta, Selasa (15/9/2026).

Sebelumnya, berdasarkan data Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemendik-tisaintek) ada 86.118 pendaftar yang lolos jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) 2026. Namun, hanya 39.662 orang yang akhirnya dinyatakan layak menerima KIP Kuliah setelah disaring DTSEN. Sisanya, 46.456 pendaftar, dinyatakan belum memenuhi kriteria. Bahkan di dalamnya terdapat 2.656 mahasiswa yang datanya bahkan belum pernah masuk ke dalam sistem desil kesejahteraan.

Atalia melanjutkan, ada 60 ribu calon mahasiswa baru tercatat tidak melakukan daftar ulang ke perguruan tinggi negeri karena kendala biaya kuliah. "Ini sebuah angka yang mencerminkan skala nyata dari persoalan desil di lapangan," kata politisi Golkar ini.

Ada pula, kata dia, pola perubahan status desil yang tidak masuk akal. Mahasiswa yang semula berada di desil 1-4 tiba-tiba berpindah ke desil 6-10 saat proses verifikasi berlangsung. Padahal tanpa ada perubahan signifikan pada kondisi ekonomi keluarganya.

Angka-angka ini, kata Atalia, bukan sekadar statistik. Di baliknya ada anak-anak yang sudah berjuang lolos seleksi, sudah punya mimpi untuk kuliah, tapi harus pulang dengan tangan hampa hanya karena kesalahan input data atau metode peringkatan yang tidak mencerminkan kondisi riil di lapangan.

Bahkan, tambah dia, dampak permasalahan desil ini terasa berlipat ganda di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan (PTKA) yang berada di bawah Kementerian Agama (Kemenag). Yakni kampus Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, hingga Ma'had Aly di lingkungan pesantren.

Karena kuota KIP Kuliah di bawah Kemenag jauh lebih kecil dibanding Kemendikti atau kementerian teknis lainnya. Sementara mahasiswanya sama-sama berjuang dan berasal dari keluarga yang tidak mampu.

Atalia mengingatkan, perubahan status desil warga tidak selalu disebabkan oleh perubahan penghasilan keluarga tapi oleh proses pemutakhiran DTSEN yang dilakukan secara berkala. Hal ini justru memperkuat argumen sistem yang ada belum siap dijadikan satu-satunya penentu nasib pendidikan seseorang. ■ TIF